

**Judul** : Pembagian Beban BI dan Pemerintah Bisa Berlanjut  
**Tanggal** : Selasa, 29 September 2020  
**Surat Kabar** : Hukum Online  
**Halaman** : 2

# Pembagian Beban BI dan Pemerintah Bisa Berlanjut

Bank Indonesia memberi ruang kerjasama dengan pemerintah demi pemulihan ekonomi

**Bidara Deo Pink**

JAKARTA. Bank Indonesia sudah berbagi beban (*burden sharing*) dengan pemerintah untuk penanganan pandemi korona pada tahun ini. Kerjasama ini bisa terus berlanjut pada tahun-tahun depan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, ia bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terus melakukan pembicaraan terkait *burden sharing* berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) II tertanggal 7 Juli 2020.

"Dalam Badan Anggaran (Banggar) sudah disinggung, kalau tahun ini tidak terealisasi, sepenuhnya bisa di *carry over* tahun depan," tutur Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/9).

Namun, keputusan *burden sharing* itu tentu melihat perkembangan dampaknya terhadap inflasi serta pertumbuhan ekonomi. BI mempersiapkan beberapa skenario jika dalam perkembangannya kedepan terjadi inflasi.

Anggota Komisi XI dari fraksi Golongan Karya (Golkar) Mukhamad Misbakhun mengingatkan, kalau nantinya

mekanisme *burden sharing* akan diperpanjang hingga tahun 2022, bisa menjadi sinyal negatif bagi pasar untuk bereaksi. Karena itu BI dan pemerintah perlu melakukan antisipasi jika terjadi reaksi pasar.

Misbakhun juga meminta kesiapan BI untuk melakukan langkah-langkah mitigasi untuk terus meyakinkan pasar. "Untuk menjaga pasar tetap percaya, BI harus menyiapkan strategi termasuk dengan pemerintah," katanya.

Anggota komisi XI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati juga menginginkan, kalau mekanisme *burden sharing* dilanjutkan, BI harus waspada terutama terkait beban dan

penghasilan BI. Belum lagi, bank sentral harus menjaga kondisi modal minimal 10% dari total kewajiban moneter.

Sementara itu, anggota komisi XI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dolfie OPF mengharapkan bank sentral memiliki kajian untuk terobosan untuk tidak mengandalkan *burden sharing* saja.

Menanggapi ini, Perry menegaskan BI dan pemerintah saat ini fokus kepada pemulihan ekonomi di dalam negeri. Pada tugas ini, BI juga bisa bertindak sebagai *stand by buyer* seperti SKB I utamanya jika pemerintah menerbitkan obligasi negara hingga tahun 2022 untuk ekonomi. ■

## Aksi Burden Sharing Bank Indonesia

- Sejak kesepakatan bersama dengan Kementerian Keuangan pada 16 April 2020 dan 7 Juli 2020, BI telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara jangka panjang di pasar perdana Rp 234,65 triliun, baik melalui mekanisme pasar sebesar Rp 5 triliun dan secara langsung sebesar Rp 183,48 triliun (per 24 September 2020).
- Posisi kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia (BI) per 25 September 2020 sebesar Rp 640,6 triliun (data transaksi). Jumlah ini termasuk pembelian SBN di pasar sekunder untuk stabilisasi nilai tukar berjumlah Rp 166,2 triliun.

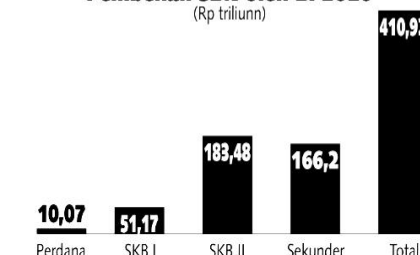
## Burden Sharing Bikin BI Tekor Rp 21 Triliun di 2021

SKEMA pembagian beban atau *burden sharing* antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan membuat neraca keuangan bank sentral akan Indonesia mencatatkan defisit.

Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan, BI akan mengalami defisit hingga Rp 21 triliun pada tahun 2021 akibat menanggung sebagian beban untuk pemulihan ekonomi nasional. "Kami laporkan dari prognosa sampai Agustus, tahun depan BI akan mengalami defisit Rp 21,8 triliun dari surplus tahun ini yang relatif besar," kata Perry dalam rapat kerja bersama dengan komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (28/9).

Selain itu, Perry juga membeberkan beberapa hal yang memengaruhi defisit neraca keuangan BI. Seperti suku bunga global yang turun sehingga menyebabkan penerimaan dari devisa asing juga turun. Tapi, Perry yakin bank sentral akan menemukan alternatif lain sehingga neraca keuangan BI tahun depan tak akan terlalu tekor. ■

**Pembelian SBN oleh BI 2020**  
(Rp triliun)



Sumber: BI